

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU

**(STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAKASSAR PERIODE 2014-2019)**

Disusun oleh :

**RIFKA JULIANI
B111 11 060**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE
PEMILU
(Studi Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar
Periode 2014-2019)**

Oleh :

**RIFKA JULIANI
B111 11 060**

Skripsi

Diajukan sebagai Tugas dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU

(Studi Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar
Periode 2014 - 2019)

Disusun dan diajukan oleh:

RIFKA JULIANI

B111 11 060


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 17 Februari 2015
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 002

Sekretaris


H. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199203 2 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**




Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal dari :

Nama : Rifka Juliani

Nomor Pokok : B111 11 060

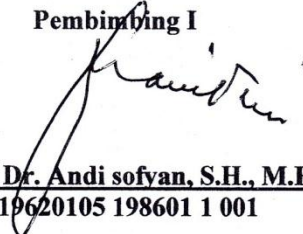
Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa kampanye pemilu (studi kasus pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Periode 2014-2019)

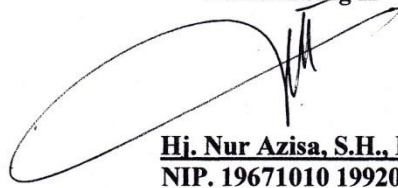
Telah diperiksa dan disetujui untuk memenuhi persyaratan ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2015

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II


Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RIFKA JULIANI**

No. Pokok : B111 11 060

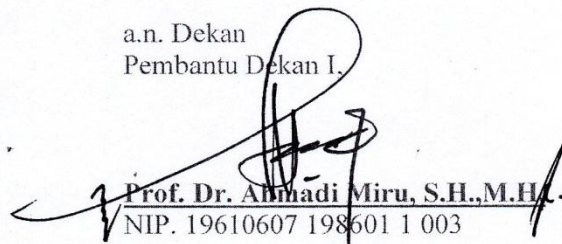
B a g i a n : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu
(Studi Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar Periode 2014-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I.



Prof. Dr. Amadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Rifka Juliani (B 111 11 060), Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu (Studi Kasus Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2014-2019) dibimbing oleh Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Hj Nur azisa selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pembagian angket terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian, selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu faktor ketidakdisiplinan, kurangnya pengawasan tidak ada sanksi yang diberikan, kebiasaan, faktor egoisme, ikut-ikutan serta sarana dan prasarana. (2) Upaya yang dilakukan oleh satlantas Polrestabes Makassar dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu melalui dua upaya yaitu yang pertama dengan upaya prefentif, dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak, maupun elektronik, serta membuat spanduk dan poster di jalan-jalan yang dianggap strategis. Kedua dengan upaya represif atau penindakan, upaya ini berupa teguran, tilang, serta penyitaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Namun demikian, maksimalnya usaha dan doa penulis, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kedepannya dapat membuahkan tulisan yang lebih baik. Amiin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayahanda H.Muh.Dahlan dan Ibunda Hj.Sunarti yang tiada henti-

hentinya mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis selama ini. Semoga kedepannya penulis dapat membalas keringat dan kerja keras yang telah kedua orang tua penulis lakukan demi mewujudkan keinginan penulis. Terima kasih kepada saudara ku Rezki Wahyuni dan Rasmi Wulandari yang selalu memberikan semangat, doa serta bantuan moril maupun materil kepada penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, staf serta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala kesabaran, petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis.
5. Bapak Prof Dr. Muhadar S.H., M.S., Bapak Prof. H. Muh Said Karim, S.H., M.H. M.Si, serta Ibu Hj. Haeranah S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim S.H., M.H selaku penasihat akademik penulis atas segala bimbingan yang telah membantu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Acara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Hukum Perdata, dan Hukum Internasional, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Staff Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Sri Wahyuni, Bapak Bunga, Bapak Usman, Bapak Ramalang, Bapak Hakim, Kak Tri, Kak Lina, Kak Tia dan lain-lain yang penulis tidak dapat menyebutkan satu

persatu yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.

9. Terima kasih juga kepada seluruh kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian penulis kepada Polrestabes Kota Makassar, Dewan Pengurus Wilayah Partai Demokrat, Dewan Pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat Kota Makassar .
10. Sahabat dan Saudara seperjuangan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nur Hidayani A, Harlina, Gustia, Ridha Ariyaniputri Samal, Dinar Alqadri, Alkisa Dwi Septiani, A. Suci Febrianti, Juwita Permatahati dan Rahmatullah Susanto yang telah menjadi keluarga penulis selama empat tahun terakhir dan mudah-mudahan seterusnya yang tak henti-hentinya mendoakan penulis, tempat berbagi suka dan duka, tempat berkeluh kesah,
11. Teman-teman seperjuangan di Asian Law Student's Association (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dayat, Molen, Yaya, ismi, Fika, Dedet, Cakin, Dede, Dian, Helvi, Terima Kasih Telah Mengizinkan Penulis Menjadi Bagian dari Kalian.
12. Teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fadhlán, Ainil, Iis, joko, afly, Ansar, Darman, Ulla, Adong, Iphe, Taufik, dan yang lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan semuanya, Terima Kasih Telah Banyak Membantu Penulis.

13. Teman-teman Angkatan 2011 (Mediasi) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan. Tidak
14. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 87 Unhas, Khusus untuk posko desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Kak Akbar, Ahmad, Awal, Kak Munji, Ayu. Vira, dan Meti. terima kasih atas kerja samanya selama KKN. Kebaikan, keseruan dan bantuan kalian akan selalu penulis ingat.
15. Terima kasih kepada senior-senior Alsa yang tidak pernah bosan membantu dan mengarahkan penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum, Kak ippang, kak zul, kak tadin, kak ridwan, kak adi, kak jumardi, kak putri, kak dikep, kak kia, kak dewi, kak muti, kak vira, dan kakak-kakak yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Terimah kasih kepada adik-adik Alsa, oji, arham, feni, ila, dian, kahfi, rahmat, olda, dan yang lainnya yang penulis tidak sebutkan satu persatu terimah kasih atas bantuanya.
17. Teman-teman SMA, Syawal, Nadra, Penge, Fatwa, Rabia, Akbar, Dewi, Mul, Luna, Wardiman, yang walau sudah tidak sama-sama penulis dalam menuntut ilmu namun masih selalu setia menemani penulis .
18. Yang terspesial penulis ucapkan banyak terimah kasih kepada Asdar Darwis, yang selalu ada buat penulis, setia mengantar penulis selama penulis melakukan penelitian. Semoga kita tetap dalam lindunganya.

Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala perbuatan dan ucapan yang sekiranya tidak berkenan. Segala bentuk kritik, masukan dan saran penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 17 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Grafik	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi	9
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas	9
1. Pengertian Pelanggaran	9
2. Pengertian Lalu Lintas	14
3. Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal	15
4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24
C. Kampanye Pemilu	24
1. Pengertian Kampanye	28
2. Pemilihan Umum	28
D. Teori-Teori Penyebab Kejahatan	31
E. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41

D. Analisis Data	42
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pelanggaran Lalu Lintas saat Kampanye Pemilu.....	43
B. Faktor Penyebab pelanggaran lalu lintas	51
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Responden	45
Tabel 4.2. Jumlah Responden	46
Tabel 4.3. Responden yang Melakukan Pelanggaran dan Tidak Melakukan Pelanggaran	47
Tabel 4.4. Jenis Pelanggaran yang Dilakukan	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan	49
Grafik 4.2. Jenis Kendaraan	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat dalam hal inilah ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.¹

Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

¹ Undang-undang pemilu dan partai politik, 2008, Jakarta selatan, Gradien Mediatama, Hlm 7.

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud di selenggarakan dengan menajmin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial melalui pemilihan umum. Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Dalam asas pelaksanaan dan lembaga penyelenggaraan pemilu Pasal 4 poin (f) menyebutkan masa kampanye. Kampanye

² Pasal 1 ayat 1 undang-undang pemilu dan partai politik 2008.

pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan program peserta pemilu.³ Kampanye pemilu dilaksanakan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.⁴ Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.

Dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh partai politik melibatkan banyak massa dan banyak kendaraan. Dimana seringkali dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang ataupun satu kendaraan saja, tetapi terjadi pula pada kendaraan yang lainnya sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas secara massal. Permasalahan ini di kalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, membahas tentang masalah pelanggaran lalu lintas dalam proses kampanye pemilihan umum ini memang sedikit menimbulkan pro dan kontra bukan saja karena permasalahan di bidang lalu lintas yang oleh sebagian orang merupakan masalah remeh dan menimbulkan suatu sikap apatis (ketidakpedulian), namun hal ini sebenarnya dapat menyebabkan bahaya yang tidak hanya dapat di rasakan oleh pihak yang melanggar melainkan juga oleh pengguna jalan umum lainnya.

³ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang pemilu dan partai politik 2008.

⁴ Pasal 76 undang-undang pemilu dan partai politik 2008.

Pelanggaran lalu lintas dalam masa kampanye kerap terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan tetapi bisa saja terjadi karena adanya faktor kesengajaan, serta tidak adanya sanksi yang di berikan oleh aparat kepolisian dalam hal pelanggaran lalu lintas secara massal ini. Sebab dalam masa kampanye dapat ditemukan banyak pengendara yang berboncengan tiga, tidak menggunakan helm, serta memakai knalpot yang memiliki suara yang bising yang dimana hal itu mengganggu pengguna jalan lainnya serta, apabila pelanggaran lalu lintas dalam masa kampanye ini dibiarkan, maka hal itu tidak hanya membahayakan diri pengendara saja, akan tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sikap kurang disiplin masyarakat yang sering melanggar Lalu lintas dalam masa kampanye merupakan fenomena sosial yang meresahkan. membahayakan keselamatan bagi pengendara itu sendiri dan melanggar Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (selanjutnya di singkat menjadi UULLAJ).

Sikap kurang disiplin masyarakat yang sering melanggar lalu lintas dalam masa kampanye merupakan fenomena sosial yang meresahkan. Menggunakan pendekatan kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial, yang meliputi pelaku kejahatan dan reaksi sosial yang

timbul terhadap pelaku dan kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka akan dicari faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menaggulangi pelanggaran Lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu. Guna menjawab pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini dipilih judul: **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Secara Massal Dalam Masa Kampaye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2014-2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu.
2. Untuk mengetahui peran aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Sebagai data kepada pembaca tentang mengapa terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu.
2. Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut dengan tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan istilah bahasa inggris *criminology* yang berasal dari bahasa latin yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.⁵ Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli antropologi perancis yang bernama P. Topinard bahwa kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Edwin H. Sutherland merumuskan pengertian kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial *Criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*, sedangkan menurut W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁶

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam bukunya *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan

⁵ A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.Makassar hlm 1.

⁶ Santoso,Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta, hlm 10.

dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan jelek itu, dalam kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang yang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan.⁷

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁸ Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu:

- a. Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma;
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian kriminologis dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok:⁹

⁷ Stephan Hurwitz, L. Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 6.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *sosio-kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Sinar Baru, hlm 28.

⁹ A.S. Alam, *op.cit*, Hlm 2

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), yang dibahas dalam proses ini yaitu:
 - 1) Definisi kejahatan;
 - 2) Unsur-unsur kejahatan;
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan;
 - 4) Penggolongan kejahatan;
 - 5) Statistik kejahatan;
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), membahas tentang :
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - 2) Teori-teori kriminologi;
 - 3) Beberapa perspektif kriminologi;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), membahas tentang:
 - 1) Teori-teori penghukuman;
 - 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

B. Tinjauan Umum mengenai Pelanggaran Lalu lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtrdingen*). Alasan pembeda antara kejahatan dengan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan yang tegas karena kedua sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi

berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.¹⁰

Pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang serta pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan baik perbuatan maupun hukumnya, karena itu juga disebut delik undang-undang.¹¹ Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikatnya dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau lebih ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan undang-undang.

Menurut W.P.J. Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan yang dapat dihukum.¹² Pompe mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

¹⁰ Amir, Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, Hlm 29.

¹¹ Marsudi, Subandi, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Cv Insan Grafika, hlm 146-154.

¹² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 81.

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Macam-macam pelanggaran adalah: Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam Pasal 498-502 KUHP. Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.¹⁴ Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dimana Buku II KUHP

¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm 182.

¹⁴ Pipin Starifuddin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 93.

(Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran.

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdeliten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁵

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdeliktern*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan *kuantitatif* (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Bisa dikatakan bahwa perbedaan antara pelanggaran dengan kejahatan adalah:

a. Pelanggaran

Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).

b. Kejahatan

¹⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneka Cipta, hlm 72.

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP).¹⁶

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu:¹⁷

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*;
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP);
- d. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun;
- e. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) pada pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah
- f. daripada pidana berat;

2. Pengertian Lalu lintas

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sebagaimana menurut W.J.S Poerwadaminta bahwa pengertian Lalu lintas adalah sebagai berikut:

¹⁶ A.S.Alam, *op.cit.*, hlm 71.

¹⁷ *Ibid*, hlm 74.

“Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya)”.

Ramdlon Naning mengemukakan bahwa pengertian Lalu lintas jalan adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik (pergi pulang) untuk mencapai tujuan.¹⁸

Namun pengertian dalam UULLAJ, yaitu Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang Lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹⁹

3. Pelanggaran Lalu lintas Secara Massal

Pelanggaran Lalu lintas jalan merupakan peristiwa Lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran Lalu lintas adalah perbuatan atau

¹⁸ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 19.

¹⁹ Pasal 1 Butir 2 Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan .

tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam Pasal 105 UULLAJ yaitu:

Setiap orang yang menggunak jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau;
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, ,membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Sementara dalam brosur penyuluhan hukum VII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Edisi 1 tahun 1993 pengertian pelanggaran lalu lintas yaitu:

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat dua golongan pelanggaran lalu lintas, yaitu:

- a. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kesengajaan;
- b. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan tidak adanya unsur kesengajaan.

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata masal diartikan sebagai mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang atau massa.

Sedangkan dalam kamus bahasa inggris disebut *mass* atau *massive*. Sehingga pelanggaran lalu lintas secara masal adalah suatu perbuatan yang melibatkan banyak orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Menurut Ramdlon naming, bahwa lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien dapat terselenggaranya kegairahan serta aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masarakat di cita-citakan, sebaliknya Lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar dan tidak efisien akan membawa kesulitan atau permasalahan di bidang Lalu lintas, yaitu berupa peningkatan pelanggaran Lalu lintas dari tahun ke tahun.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor. Sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas antara lain:²⁰

- a. Faktor manusia, biasanya di sebabkan sikap pemakai jalan yang kurang memperhatikan kedisiplinan dan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, penumpang, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah. Selain itu adanya tingkah laku bagi sebageian pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor yang menjaminya seperti mudah diselesaikan dengan atur damai;
- b. Faktor sarana jalan, sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan adanya pipa galian, seperti pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat menyebabkan kemacetan;
- c. Faktor kendaraan, kendaraan sebagai salah satu penyebab terjadinya pelanggran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan yang semakin pesat di bidang teknologi yang semakin canggih itu, maka berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu di produksi dalam waktu yang *relative* singkat. Akan tetapi bila hal itu tidak di imbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang dapa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas

²⁰ Soekanto, soerjono, 1997, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, cv rajawali, hlm 93.

yang dapat menyebabkan kerawanan di dalam pemakai jalan, sehingga sering terjadi timbulnya kejahatan seperti, penodongan, pencopetan, dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain, ban gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya;

- d. Faktor keadaan alam, pelanggaran lalu lintas akibat keadaan alam atau lingkungan itu biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak di sangka-sangka.

Dengan demikian, untuk menghindari pelanggaran lalu lintas secara masal maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan patuh terhadap peraturan-peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu lintas Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UULLAJ, baik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan) maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 UULLAJ, yang berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305 Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran

Atas dasar Pasal 316 UULLAJ dapat diketahui Pasal-Pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Dari ketentuan Pasal 316 ini dapat disimpulkan bahwa seseorang dikategorikan melakukan pelanggaran apabila melanggar ketentuan-ketentuan UULLAJ. Adapun undang-undang yang di langgar yaitu:

Pasal 274

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan

lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

C. Kampanye Pemilu

1. Pengertian Kampanye

Definisi kampanye pemilu dalam Undang-undang pemilu dan partai politik Nomor 2 tahun 2008 angka 26 adalah kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya.

Dasar Hukum Kampanye:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Pasal 77 mengatur bahwa kampanye pemilu

merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;

- b. Pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dijabarkan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013.
- c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 75.

Prinsip, fungsi dan tujuan Kampanye:

- a. Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip efisiensi, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan;
- b. Kampanye peserta pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga Negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik;
- c. Kampanye peserta pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga Negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan atau informasi lainnya untuk menyakinkan pemilihan dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya;

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam kampanye adalah sebagai berikut:²¹

- a. Tim kampanye didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon;

²¹ Noor M, Aziz, 2011, *Pemilihan Kepala Daerah*, cililitan, badan pembinaan hukum nasional dan kementrian hukum dan ham RI, hlm 60

- b. Penanggungjawab kampanye adalah pasangan calon yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye;
- c. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang;
- d. Dalam kampanye rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye;
- e. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
- f. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) Pertemuan terbatas;
 - 2) Tatap muka dan dialog;
 - 3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - 4) Penyiaran media radio dan/atau televisi;
 - 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - 6) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - 7) Rapat umum;
 - 8) Debat public/debat terbuka antara calon dan/atau;
 - 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat;
 - b) Calon berhak untuk mendapat informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif;
- d) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah;
- e) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan dalam rangka kampanye;
- f) Pemerintah memberikan fasilitas kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum;
- g) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
- h) Pemasangan alat peraga kampanye oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus izin pemilik tempat tersebut;
- j) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara;

Didalam kampanye dilarang melibatkan:²²

²² undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79 ayat 1.

- a. Hakim pada semua peradilan;
- b. Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Pejabat *structural* dan fungsional dalam jabatan Negara;
- d. Kepala desa.

Larangan tersebut tidak berlaku apabila pejabat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pejabat Negara yang menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:²³

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara, dan;
- c. Pengaturan alam cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.²⁴

²³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 79 ayat 2 dan

3. ²⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat 4.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara pembuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara.²⁵ Umaruddin Masdar, mendefinisikan pemilihan umum dari sudut pandang teknis pelaksanaan, sehingga munculah definisi bahwa pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.²⁶ Agak lebih luas dari definisi yang disampaikan Umaruddin tersebut, Rumidan Rabi'ah' mendefinisikan pemilu sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.²⁷

Sedangkan Ibnu Tricahyo mendefinisikan pemilu dari sudut pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada nilai filosofisnya. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²⁸ Dalam konteks sistem demokrasi, apa yang dikatakan Ibnu cukup membenarkan apa yang dikatakan Lances Castles bahwa pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik Negara demokratis modern.²⁹

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga), Jakarta, pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , Balai Pustaka,2005, hlm 874.

²⁶ Umaruddin masdar, dkk, *Mengasah Naluri Public Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta, Ikis dan asia foundation,1999, hlm 117.

²⁷ Rumidan rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,2009, hlm 46.

²⁸ Ibnu Tricahyo, *reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan local*, malang, in trans publishing,2009,hlm 6.

²⁹ Lances Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komperatif dan Historis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004, hlm 1.

Jimly Asshiddiqie mengelompokkan sistem pemilu menjadi dua macam, yaitu: sistem pemilihan mekanis, dan sistem pemilihan organis.³⁰ Dalam sistem mekanis, rakyat dilihat dan dipandang sebagai massa individu –individu yang sama. Individu dilihat sebagai penyandang hak dan masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan. Sedangkan dalam sistem yang bersifat organis, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan social, dan lembaga-lembaga social. Sehingga persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih.³¹ Dari kedua sistem tersebut, sistem mekanisme merupakan sistem yang lebih umum dan selalu menghiasi perdebatan seputar sistem pemilihan umum yang diterapkan negara-negara di dunia. Secara umum ragam sistem pemilu (mekanis) berkisar hanya pada dua prinsip pokok saja, yaitu:³²

- a. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil);
- b. *Multi- member constitutuecy* (satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil).

Single-member constituency disebut juga dengan sistem distrik.

Dalam sistem distrik, wilayah Negara di bagi berdasarkan daerah-

³⁰ jimly Asshiddiqie, *pengantar ilmu hukum tata Negara, jilid II Sekretaris Jenderal*, dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm 179.

³¹ *Ibid.*, hlm 179-180.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hlm 461-462.

daerah pemilihan (distrik pemilihan). Pembagian daerah pemilihan disesuaikan dengan berapa jumlah kursi legislatif yang akan diperebutkan. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak).³³

Sedangkan *Multi-member constituency* disebut juga dengan sistem proposional. Dalam sistem ini, wilayah Negara tidak dibagi sesuai dengan jumlah kursi yang diperebutkan, tetapi dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan besar, dimana di masing-masing wilayah pemilihan akan dipilih beberapa orang wakil. Dengan demikian, maka satu daerah pemilihan diwakili oleh beberapa orang wakil rakyat. Dalam sistem ini, pembagian kursi didasarkan pada faktorimbangan jumlah penduduk.³⁴

D. Teori-Teori Penyebab Kejahatan

Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian: ³⁵

1. Titik pandang secara makro (*macrotheories*)

Titik pandang makro ini menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan kejahatan pada pelaku kejahatan. Misalnya teori anomie dan teori konflik.

2. Titik pandang secara mikro (*microtheories*)

³³ A.S.Alam, *op.cit.*, Hlm 462.

³⁴ *Ibid*, hlm 462.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 1992, hlm 71.

Titik pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan suatu kejahatan.

3. *Bridging Theories*

Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat. Lebih lanjut lagi A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian :

a. Teori-teori Anomie (Ketiadaan Norma)

1) Emile Durkheim

Ahli sosiologis Perancis, Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada *normlessness, lessens social control* yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang

menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda. Penjelasan tentang perbuatan manusia menurut Durkheim tidak terletak pada diri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks ini, Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.³⁶

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu akan berada dalam kondisi *anomie*.³⁷

2) Robert Merton

Dalam *social theory and social structure*, Robert Merton pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori *anomie* Durkheim

³⁶ *Ibid*, Hlm 47.

³⁷ *Ibid*, Hlm 47-48.

mengemukakan bahwa *anomie* adalah salah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain *anomie is a gap between goals and means creates deviance*. Tetapi konsep Merton mengenai *anomie* agak berbeda dengan konsep Durkheim. Teori *anomie* dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *institutionalised means* atau *accepted ways*. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*)³⁸.

Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum dan semua orang di dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui *legitimate means* (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh dibelakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh *talented*.³⁹

³⁸ *Ibid*, Hlm 50

³⁹ *ibid*, Hlm 50

Pada saat Merton pertama menulis artikelnya, *social structure and anomie*, teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud abnormal. Oleh karena itu, penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke dalam tingkah lakunya yang menyimpang. Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi *strain (mode of adoption)*, yaitu: ⁴⁰

- a) *Conformity*, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada di masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan;
- b) *Innovation*, terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut;
- c) *Ritualism*, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma yang mengatur *institutionalized means*, dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari (pasrah);
- d) *Retreatism*, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan (mengucilkan diri);

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 52.

e) *Rebellion*, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada (demonstrasi).

3) Cohen

Teori anomie Cohen disebut *Lower Class Reaction Theory*. Inti dari teori ini adalah *delinquency* timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.⁴¹

b. Teori-teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dalam *cultural deviance theories*, adalah *social disorganization*, *differential association*, *cultural conflict*.⁴²

c. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku

⁴¹ *ibid*, Hlm 50-53.

⁴² *ibid*, hlm 54.

manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial yang merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat . untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan aturan-aturan masyarakat.⁴³

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana

⁴³ *ibid*, hlm 61.

larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);

3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan empirik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:⁴⁵

1. Pre-Emtif

Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

⁴⁴ *ibid*, hlm 18-19.

⁴⁵ *ibid*, hlm 79.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian tersebut yaitu di kota Makassar. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di Polresta Makassar, dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai politik. Adapun pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat kepolisian, partai politik, serta pelaku pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye pemilu.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh penulis melalui Buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, majalah dan situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Agar suatu karya ilmiah dapat teruji secara ilmiah dan objektif, maka dibutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan serta mempunyai ketertarikan dengan masalah yang penulis teliti, maka adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu berupa:

1. Penelitian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan membaca Buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan yang diangkat oleh penulis.

2. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan wawancara langsung (interview) dengan pihak kepolisian, partai politik,

serta membagikan angket kepada pelaku pelanggaran Lalu lintas pada masa kampanye pemilu.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pelanggaran Lalu lintas saat Kampanye Pemilu

Kampanye pemilu merupakan merupakan kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya. Kampanye pemilu dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran media radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraba di tempat umum, rapat umum, debat *public* atau debat terbuka antara calon dan/atau, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang banyak melibatkan massa yaitu melalui tatap muka, atau sering juga disebut dengan kampanye terbuka. Proses ini banyak diikuti oleh berbagai kalangan guna mewujudkan bentuk dukunganya secara langsung kepada para peserta pemilu.

Dalam pelaksanaan kampanye terbuka sering melibatkan banyak kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga dalam pelaksanaanya, suatu partai politik harus menyiapkan konsep yang matang agar proses kampanye dapat berjalan dengan lancar. Menurut Bapak Sukman Baharuddin (Dir.Executif Partai Demokrat) menyatakan bahwa hal yang dipersiapkan oleh partai politik, khususnya partai demokrat yaitu berupa menunjuk satgas yang bertugas untuk mengatur massa

saat proses kampanye, mengurus administrasi pendukung misalnya surat izin keramaian, melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan pengamanan, serta mematuhi segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴⁶

Terkait dengan pelaksanaan kampanye terbuka yang melibatkan banyak massa di perlukan suatu strategi sehingga massa yang hadir dalam kampanye tersebut tetap mampu di kordinir dengan baik, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Mudzakkir Ali Djamil (Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera), menyatakan bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya mengurangi pelanggaran Lalu lintas yang dilakukan peserta kampanye, partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu mengkordinir simpantisan dengan mengefektifkan orang-orang yang ada di struktur, Kader Partai, dan Caleg itu sendiri untuk mengingatkan para simpatisan agar tetap mematuhi peraturan yang ada.⁴⁷ Namun dalam kenyataanya di lapangan pelanggaran Lalu lintas saat proses kampanye masih banyak dilakukan oleh peserta kampanye.

Sebelum penulis membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai

⁴⁶ Hasil Wawancara Tanggal, 27 Desember 2014, Pukul 17.00 WITA.

⁴⁷ Hasil Wawancara Tanggal, 12 Januari 2015 Pukul 15.30 WITA.

subjek dari penelitian ini adalah masyarakat umum sebanyak 20 orang responden, mahasiswa sebanyak 20 orang responden, pelajar sebanyak 20 orang responden, dan pegawai swasta sebanyak 20 orang responden. Sehingga total responden yang dibagikan angket sebanyak 80 (delapan puluh) responden yang tersebar di kota Makassar. Adapun bentuk rincianya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Data Responden

No.	Jenis Responden	Jumlah
1.	Mahasiswa	20
2.	Pelajar	20
3.	Masyarakat umum	20
4.	Pegawai Swasta	20
Jumlah		80

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Pemberian angket dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Januari 2015. Dari hasil penelitian penulis dimana angket yang disebar sebanyak 80 responden tidak semua responden pernah mengikuti kampanye pemilu, responden yang tidak mengikuti kampanye pemilu dan responden yang mengikuti kampanye pemilu diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Jumlah Responden

No	Jenis Responden	Yang pernah mengikuti kampanye pemilu	Yang tidak mengikuti kampanye pemilu
1	Mahasiswa	10	10
2	Pelajar	7	13
3	Masyarakat umum	17	3
4	Pegawai swasta	15	5
Jumlah		49	31

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Berdasarkan tabel diatas dimana responden yang pernah mengikuti kampanye pemilu yaitu mahasiswa sebanyak 10 orang responden, pelajar 7 orang responden, masyarakat umum sebanyak 17 orang responden dan pegawai swasta sebanyak 15 orang responden, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kampanye pemilu banyak diikuti oleh masyarakat umum, dimana penulis mengambil sampel masyarakat umum ini terdiri dari tukang ojek, tukang becak, buruh bangunan, ibu rumah tangga, serta sopir angkutan umum, namun tidak semua responden yang mengikuti kampanye pemilu melakukan pelanggaran Lalu lintas, adapun responden yang melakukan pelanggaran Lalu lintas dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Responden yang melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran

No.	Jenis Responden	Yang Melanggar Lalu lintas Saat Kampanye	Yang Tidak Melanggar Lalu lintas Saat Kampanye
1.	Mahasiswa	8	2
2.	Pelajar	7	-
3.	Masyarakat umum	11	6
4.	Pegawai swasta	9	6
Jumlah		35	14

Berdasarkan tabel diatas, responden yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas saat mengikuti kampanye yaitu mahasiswa yang melanggar lalu lintas saat kampanye yaitu sebanyak 8 orang responden sedangkan yang tidak melanggar lalu lintas yaitu 2 orang responden, pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas saat kampanye yaitu sebanyak 7 responden dan tidak ada pelajar yang taat aturan saat mengikuti kampanye, masyarakat umum yang mengikuti kampanye dan tidak melanggar lalu lintas yaitu sebanyak 11 responden dan yang taat aturan sebanyak 6 orang responden, dan pegawai swasta yang melakukan pelanggaran lalu lintas saat kampanye sebanyak 9 orang responden dan yang taat aturan lalu lintas yaitu sebanyak 6 orang responden, berdasarkan tabel diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas saat kampanye pemilu yaitu masyarakat umum.

Tabel 4.4. Jenis Pelanggaran yang Dilakukan

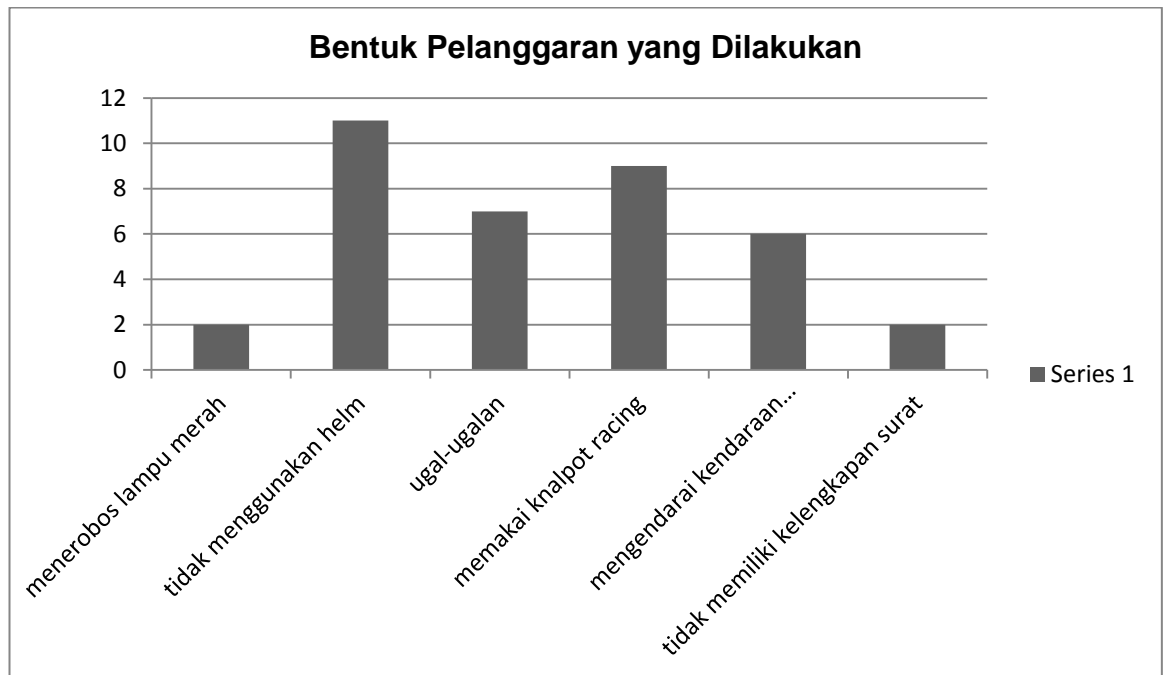
No.	Jenis Pelanggaran Lalu lintas yang Dilakukan saat	Jumlah
-----	---	--------

	Kampanya Pemilu	
1.	Menerobos lampu merah	2
2.	Tidak menggunakan helm	11
3.	Membawa kendaraan dengan ugal-ugalan	5
4.	Memakai knalpot racing	9
5.	Menggunakan kendaraan melebihi kapasitas penumpang	6
6.	Tidak memiliki surat-surat yang lengkap	2
Jumlah		35

Berdasarkan tabel diatas, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan saat kampanye pemilu bermacam-macam yaitu, responden yang menerobos lampu merah yaitu 2 responden, responden yang melakukan pelanggaran yaitu dimana tidak menggunakan helm yaitu 11 responden, responden yang membawa kendaraanya secara ugal-ugalan yaitu sebanyak 5 responden, responden yang memakai knalpot racing yaitu 9 responden, responden yang melanggar Lalu lintas dimana mengendarai kendaraanya dengan kelebihan muatan dalam hal ini berupa bonceng tiga bagi kendaraan bermotor dan melebihi muatan bagi kendaraan roda empat atau mobil yaitu sebanyak 6 responden dan responden yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan berupa STNK dan surat izin mengemudi (SIM) yaitu sebanyak 2 responden.

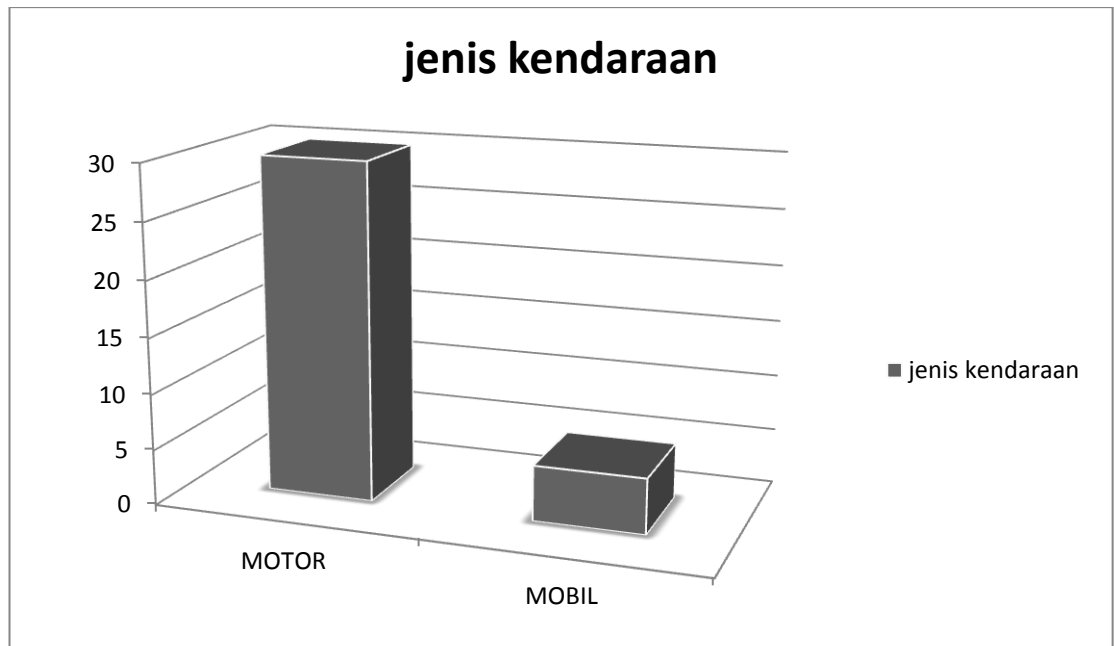
Selain pada tabel diatas bentuk-bentuk pelanggaran juga dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4.1. Bentuk Pelanggaran yang dilakukan



Pada grafik jelas terlihat perbedaan dimana bentuk pelanggaran yang lebih banyak dilanggar oleh peserta kampanye yaitu tidak menggunakan helm bagi kendaraan bermotor sedangkan pada kendaraan roda empat (mobil) bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu dimana memuat penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan.

Grafik 4.2. Jenis Kendaraan



Berdasarkan diagram diatas, jumlah kendaraan yang mendominasi melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu kendaraan bermotor, dimana responden yang melanggar lalu lintas saat kampanye yang menggunakan kendaraan bermotor yaitu sebanyak 30 orang responden, sedangkan responden yang melakukan pelanggaran lalu lintas saat kampanye pemilu menggunakan roda empat atau mobil sebanyak lima responden.

Menurut Haikal (22. Mahasiswa), dia menggunakan kendaraan roda dua sebab saat proses kampanye banyak kendaraan sehingga untuk mempermudah sampai ke tempat kampanye ataupun saat arak-arakan kendaraan roda dua lebih

efekti di gunakan sebab ukuranya yang tidak besar sehingga mudah untuk mendahului kendaraan lainya.⁴⁸

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa dalam tiap proses kampanye pemilu yang lebih banyak atau dominan melakukan pelanggaran Lalu lintas yaitu kendaraan roda dua atau motor, sebab motor sangat fleksibel sehingga memudahkan pengendara untuk menghindari macet.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu lintas Secara Massal dalam Masa Kampanye

Terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu di Kota Makassar di sebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Lalu lintas secara massal dalam masa kampanye yaitu:

1. Faktor ketidakdisiplinan (*Indiscipline Factor*)

Kedisiplinan dalam berlalu lintas sangat penting sebab disiplin berlalu lintas dapat menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan tertib, namun bagi para peserta kampanye hal tersebut sulit untuk dilakukan sebab banyak peserta kampanye tidak tertib dan disiplin dalam berkendara. Kedisiplinan dalam berkendara dapat melahirkan suatu sikap yang taat terhadap aturan ataupun hukum yang berlaku.

H.C Kelman, membagi tingkat ketaatan menjadi tiga yaitu:

⁴⁸ Hasil wawancara Tangga, 24 Desember 2014 Pukul 15.00 WITA.

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-nebar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.⁴⁹

Namun tingkat ketaatan yang banyak di miliki oleh peserta kampanye yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, dimana satu peserta kampanye Asriadi (24, Mekanik) menyatakan bahwa saat kampanye dia mengendarai kendaraanya dengan menggunakan knalpot *racing* serta tidak menggunakan helm padahal dia mengetahui bahwa hal tersebut jelas melanggar peraturan lalu lintas.⁵⁰ Lain halnya dengan Zulfikar, (26, swasta) yang mengaku melanggar Lalu lintas saat kampanye sebab banyak orang yang melanggar.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa peserta kampanye melanggar karena ketidakdisiplinan sebab para peserta telah mengetahui peraturanya namun tetap melanggar selain itu massa yang banyak sehingga tidak adanya ketakutan untuk di tahan oleh aparat, hal inilah yang paling banyak di langgar oleh peserta kampanye pemilu.

⁴⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Prenada Media Group, Hlm 348.

⁵⁰ Hasil wawancara Tangga, 23 desember 2014 pukul 13.00 WITA.

⁵¹ Hasil wawancara Tangga, 30 desember 2014 pukul 16.00 WITA.

2. Kurangnya Pengawasan

Pada dasarnya setiap kegiatan yang besar atau pun menurunkan banyak massa memerlukan izin dari pihak kepolisian berupa izin keramaian terutama dalam hal kampanye pemilu. Kampanye pemilu merupakan suatu kegiatan yang resmi yang akan melibatkan banyak massa dan banyak kendaraan yang akan berkumpul pada satu titik yang telah ditentukan.

Menurut Aiptu Syahrul (KAUR Mintu Bag.Lalu lintas) pihak kepolisian di turunkan pada titik-titik yang dianggap perlu serta banyaknya petugas yang di turunkan sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang akan hadir.⁵² Namun pada kenyataanya di lapangan bahwa jumlah aparat kepolisian tidak sebanding dengan jumlah peserta kampanye sehingga penulis berkesimpulan bahwa massa yang hadir lebih besar dari jumlah anggota kepolisian yang di turunkan, sehingga massa dapat melakukan pelanggaran lalu lintas secara leluasa.

3. Tidak Adanya Sanksi yang Diberikan

Dalam proses kampanye pemilu pihak kepolisian diturunkan hanya untuk mengamankan proses jalanya kampanye terbuka yang di pusatkan di suatu tempat yang telah ditentukan. Serta di tentukan titik-titik penting yang dianggap perlu untuk dijaga oleh aparat Kepolisian. Aiptu Syahrul (KAUR Mintu Bag.Lalu lintas) menyatakan bahwa kita tidak melakukan penilangan di tempat ataupun teguran kepada para

⁵² Hasil Wawancara Tanggal, 8 Desember 2014 Pukul 10.00 WITA.

peserta kampanye yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kami hanya mengamankan jalannya proses kampanye sebab proses untuk menindak lanjuti pelanggaran Lalu lintas di lakukan bila kampanye telah selesai.⁵³

Penulis berkesimpulan bahwa banyaknya peserta kampanye melanggar Lalu lintas sebabkan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh aparat kepolisian dalam menindak lanjuti peserta kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran lalu lintas, penindakan dilakukan setelah kampanye selesai bahkan hal itu belum efektif dilakukan oleh pihak kepolisian.

4. Faktor Kebiasaan

Pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu sering terjadi, sebab kampanye pemilu terbuka yang dilakukan melibatkan banyak massa serta kendaraan, dalam setiap pelaksanaanya sering di jumpai bentuk-bentuk pelanggaran Lalu lintas yang dilakukan secara massa oleh peserta kampanye. Menurut Devi Utami (22, Mahasiswa) dia melanggar peraturan Lalu lintas sebab ikut alur.⁵⁴

Penulis berkesimpulan bahwa pelanggaran Lalu lintas secara massal dalam masa kampaye pemilu telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat sebab tidak adanya sanksi yang tegas yang mampu memberikan efek jera kepada para

⁵³ Hasil wawancara Tanggal, 8 Desember 2014 Pukul 10.00 WITA.

⁵⁴ Hasil Wawancara Tanggal, 18 Desember 2014 Pukul 13.00 WITA.

pelanggar, ini membuat masyarakat banyak melakukan pelanggaran Lalu lintas saat kampanye pemilu.

5. Faktor Egoisme

Pihak kepolisian sudah mengumumkan kepada partai politik dan para simpatisan agar tetap menjaga ketertiban selama proses kampanye terutama menaati peraturan lalu lintas, namun kenyataanya di lapangan banyak peserta kampanye yang melanggar peraturan Lalu lintas.

Menurut Aiptu Syahrul (Kaurmintu Satlantas Polrestabes Makassar) bahwa banyaknya pelanggaran Lalu lintas saat kampanye pemilu di sebabkan adanya sifat egoisme dari partai politik yang dimana partai politik hanya mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya.⁵⁵

Partai politik hanya memikirkan kepentingan partai tanpa adanya kepedulian akan keselamatan dari para peserta kampanye sebab partai politik tidak menekankan kepada para simpatisan agar tetap mematuhi peraturan Lalu lintas yang dapat membahayakan diri para simpatisan itu sendiri.

6. Faktor Ikut-ikutan

Dalam masa kampanye pemilu terjadi pelanggaran Lalu lintas secara massal sebab proses kampanye melibatkan banyak massa dan kendaraan sehingga memungkinkan seseorang banyak melanggar

⁵⁵ Hasil wawancara Tanggal, 8 Desember 2014 Pukul 10.00 WITA.

peraturan Lalu lintas, menurut Reza Syafiruddin (22, Mahasiswa) dia melanggar sebab banyak peserta lainya juga yang melanggar.⁵⁶ Sehingga penulis berkesimpulan bahwa seseorang melanggar peraturan lalu lintas saat kampanye pemilu di sebabkan karena ikut-ikutan dengan pendedara lainya.

7. Faktor sarana dan prasarana

Pelanggaran lalu lintas saat kampanye pemilu tidak hanya di pengaruhi oleh faktor kedisiplinan, kurangnya pengawasan, factor ikut-ikutan, egoisme dll, namun sarana dan prasarana yang mendukung proses berlalu lintas juga harus di perhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat tertib berlalu lintas.

C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Pelanggaran lalu lintas terjadi sebab adanya factor yang mempengaruhinya. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas saat kampanye pemilu, bukanlah merupakan orang jahat/ penjahat, seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas saat kampanye pemilu yaitu seseoraang yang lalai dalam menyalahgunakan hak-hak yang dimilikinya.sehingga perlu adanya upaya atau langkah guna mencegah terjadinya pelanggaran Lalu lintas saat kampanye pemilu.

⁵⁶ Hasil wawancara Tanggal, 2 Desember 2014 Pukul 13.00 WITA.

Dalam hal menaggulangi pelanggaran Lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu, hal yang utama yang harus di perhatikan dan menjadi pertimbangan yaitu apa sajakah faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran secara massal dalam masa kampanye pemilu yang telah di paparkan oleh penulis, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak polrestabes Makassar untuk mencegah terjadinya pelanggaran Lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu dengan dua cara yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan paparkan sebagai berikut:

1. Upaya preventif, yaitu merupakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. adapun upaya ini antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektornik

Media cetak dimana akan diterbitkan di surat kabar sehingga para peserta kampanye dapat mengetahui aturan-aturan sebelum mengikuti kampanye, serta melalui media elektonik yaitu melalui televisi dalam bentuk iklan masyarakat yang di himbau kepada para peserta kampanye dapat menjaga ketertiban dan taat dalam mengikuti kampanye pemilu.

- b. Membuat spanduk dan poster di sepanjang jalan-jalan yang strategis.
2. Upaya Represif, upaya ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan saat telah terjadi tindakan pidana/kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum (*law enforcement*). Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara massal yang dilakukan oleh peserta kampanye pemilu, maka perlu upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan yakni:
- a. Penindakan dengan Teguran

Dalam proses kampanye yang melibatkan banyak massa, pihak kepolisian hanya memberikan teguran kepada para peserta kampanye yang melanggar, sebab selama proses kampanye pihak kepolisian hanya bertugas untuk mengamankan jalanya proses kampanye tidak melakukan penindakan terhadap peserta kampanye yang melanggar peraturan Lalu lintas.
 - b. Penindakan dengan Tilang

Tilang merupakan bukti pelanggaran, dimana tilang diberikan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Pihak kepolisian berhak menilang pelanggar lalu lintas saat kampanye pemilu apabila proses kampanye pemilu telah selesai dilaksanakan.
 - c. Penindakan dengan Penyitaan

Penyitaan dilakukan apabila pengendara tidak mampu menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan serta mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas. Dengan adanya upaya diatas diharapkan mampu menciptakan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

Menurut Aiptu Syahrul, upaya ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam pelanggaran berlalu lintas saat proses kampanye, walaupun tidak sepenuhnya masyarakat dapat mematuhi hal tersebut namun dengan adanya sanksi diharapkan dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang tetap melanggar Lalu lintas saat kampanye walaupun tahu akan sanksinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pada bab sebelumnya mengenai pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan membahas tentang faktor-faktor serta upaya penanggulangan mengenai pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ketidakdisiplinan (*indiscipline factor*), kurangnya pengawasan, tidak adanya sanksi yang diberikan, faktor Kebiasaan, faktor egoisme, ikut-ikutan, serta sarana dan prasarana.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh satlantas polrestabes Makassar dalam menaggulani pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu melalui dua upaya yaitu yang pertaman dengan upaya prefentif, dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak, maupun elektronik, serta membuat spanduk dan poster di jalan-jalan yang dianggap strategis. Ke dua dengan upaya represif atau penindakan, upaya ini berupa teguran, tilang, serta penyitaan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlu adanya kordinasi yang lebih antara pihak kepolisian dengan perwakilan partai politik mengenai dalam hal menjaga ketertiban umum saat proses kampanye, sebab hal ini menyangkut kepentingan masyarakat umum.
2. Perlu adanya sanksi yang tegas yang dapat di berikan oleh peserta kampanye yang melanggar Lalu lintas saat proses kampanye terbuka, agar proses kampanye tidak dijadikan suatu tempat untuk melanggar Lalu lintas, melainkan kampanye pemilu dapat juga jadi moment untuk dijadikan percontohan berLalu lintas yang tertib dan baik.
3. Sanksi yang diberikan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi pengendara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama.
4. Polisi harus melakukan penindakan di tempat berupa tilang ataupun penyitaan kendaraan bagi peserta kampanye yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
5. Partai politik sebaiknya tidak hanya mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya dalam mengikuti kampanye, melainkan juga menekankan kepada para peserta kampanye agar selalu mematuhi peraturan-peraturan dalam hal ini mengenai tertib berLalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Marsudi, Subandi. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Cv Insan.
- Ibnu Tricahyo. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Local*. Malang: In Trans Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta.
- Kamus besar bahasa Indonesia (edisi ketiga). 2005. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lances Castles. 2004. *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komperatif dan Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Aziz, Noor, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Cililitan , Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementrian Hukum dan Ham RI.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, Hlm 71.
- Rumidan Rabi'ah. 2009. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Soedjono, Dirdjosisworo. 1984. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Stephan Hurwitz, L Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Perada.
- Umaruddin Masdar, dkk. 1999. *Mengasah Naluri Public Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: Ikis dan Asia Foundation.
- Warpani Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SK / 06 / XII / 2014 / Subbagkum

1. Rujukan :

Surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar Nomor : 8193 / UN4.6.3PL.02/2014 tanggal 25 Nopember 2014. Perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : RIFKA JULIANI
Nomor Pokok : B 111 11060
Program Studi : ILMU HUKUM
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, KM 10 Makassar

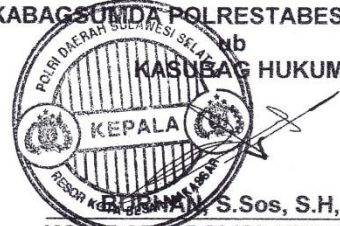
Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

" TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALULINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Desember 2014

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUKUDA POLRESTABES MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Kepala BKPM D Prov. Sulsel
3. Dekan Fak.Hukum Unhas Makassar

S.Sos, S.H, MH
KOMISARIS POLISI NRP 64050217



SURAT KETERANGAN

Nomor : 10/K/SKET/AS-21-PKS/III/1436

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Hamido, S.Pd., M.Si

Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Rifka Juliani

Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

No. Pokok : B111 11 060

Benar telah melakukan penelitian/wawancara pada :

Hari / Tanggal : Senin / 12 Januari 2015

Tempat : Kantor DPRD Kota Makassar


Informan : Mudzakkir Ali Djamil, ST

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Makassar

Untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu"

Makassar, 13 Januari 2015

DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA MAKASSAR



PKS
Hasan Hamido, S.Pd., M.Si
Ketua Umum



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRAT
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sekretariat : Jalan Pengayoman No. 8 Makassar, Sulsel. 90000 | Tel. 0411-457026/457027 | E-mail : demokratsulsel@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 435 /B/DPD.PD.SULSEL/XII/2014

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

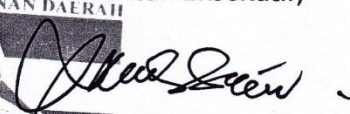
Nama : **Rifka Juliani**
No. Pokok : B111 11 060
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Kande 3 KIP 5 No. 8A Makassar

Sesuai dengan Surat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No. 8193/UN.4.6.3/PL.02/2014 Perihal : Penelitian, maka dengan ini kami menyatakan telah memfasilitasi dan yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Desember 2014

Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrat
Provinsi Sulawesi Selatan

Direktur Eksekutif,

Ir. H. Sukman Baharuddin, M.Sc